



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
KECAMATAN KEDAWUNG
TAHUN 2024**

**Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung 45153
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung tahun 2024 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Kedawung yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Kedawung, Juli 2024

CAMAT KEDAWUNG

MOH. FIRDAOS AGIH, ST, MM.

Pembina

NIP. 19770504 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN KECAMATAN KEDAWUNG TAHUN 2023.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedawung	13
2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	14
2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	17
2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan.....	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN KEDAWUNG	19
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung	19
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024.....	20
4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	20
BAB V PENUTUP	8

Lampiran Peraturan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2024

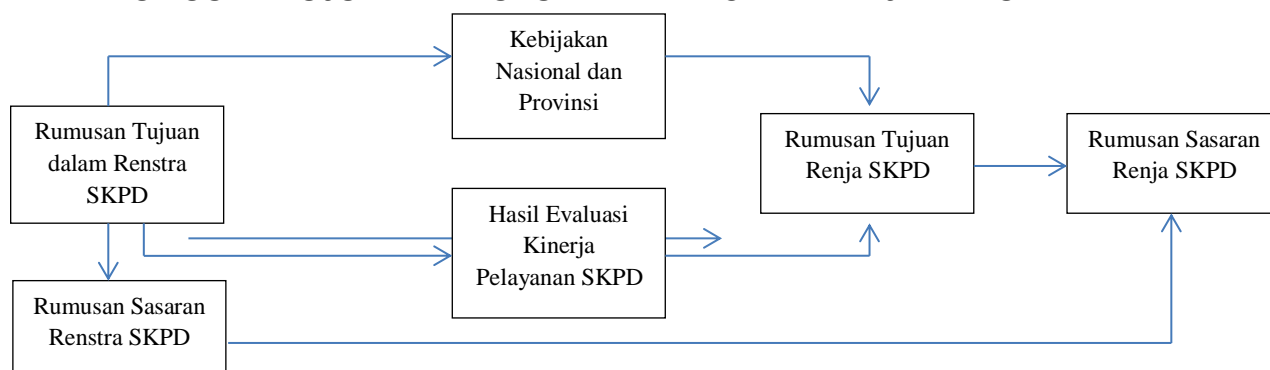
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Tahun 2024-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERUBAHAN



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Kedawung, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- o. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- p. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2024-2026;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026
- s. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Kedawung untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Kedawung.

- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah:
1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kedawung

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedawung Tahun 2024

- 3.1.Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung

Bab IV Rancana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedawung Tahun 2024

- 4.1.Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN KECAMATAN KEDAWUNG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung.

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2,413,145,772,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.284.371.61,00 atau 94.66%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kedawung Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.095.284.272 dan terealisasi sebesar Rp. 1.972.766.526 sisa sebesar Rp.122.517.746 atau tercapai sebesar 94,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

Outcome Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah: 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.320.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.320.000 sisa sebesar Rp. 0

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 780.000.00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan: 2 Dokumen atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 540.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.827.212.400 dan terealisasi sebesar Rp. 1.707.781.934 sisa sebesar Rp. 119.430.466.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.825.802.400 dengan realisasinya Rp. 1.706.371.934 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 119.430.466 (Pencapaian input 93,46 %)

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan: 12 Pegawai atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 780.000 dengan realisasinya Rp. 780.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan: 1 Laporan atau telah tercapai 100 %

- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 630.000 dengan realisasinya Rp. 630.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan: 18 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Alokasi anggaran
- Output** kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.
- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000 dengan realisasinya Rp. 1.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0(Pencapaian input 100,00 %.
- Output** sub kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan: 9 Paket atau telah tercapai 100 %
- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan Alokasi dana sebesar Rp. 9.616.000 dengan realisasinya Rp. 9.616.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) atau tercapai sebesar 100 %.
- Output** kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor: 1 paket atau telah tercapai 100 %
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.320.000 dengan realisasinya Rp. 1.320.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100 %.
- Output** sub kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran makanan dan minuman dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman: 11 Paket atau telah tercapai 100 %
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.499.700 dengan realisasinya Rp. 1.499.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).
- Output** sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan: 7 Paket atau telah tercapai 100 %
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Alokasi dana sebesar Rp. 6.720.100 dengan realisasinya Rp. 6.720.100 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0(Pencapaian input 100,00 %.
- Output** kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan

perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor: 23 Paket atau telah tercapai 100 %

- f. Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.502.200 dengan realisasinya Rp. 1.502.200 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0(Pencapaian input 100,00 %

Output sub kegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas: 15 laporan atau telah tercapai 100 %

- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 16.987.472 dan terealisasi sebesar Rp.15.049.992 sisa sebesar Rp. 1.937.480.

Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 14.957.472 dengan realisasinya Rp. 13.019.992 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.937.480(Pencapaian input 87,05 %)

Output sub kegiatan adalah jumlah rekening yang dibayarkan: 1 Rekening atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.030.000 dengan realisasinya Rp.2.030.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: 3 laporan atau telah tercapai 100 %

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 228.106.400 dan terealisasi sebesar Rp. 226.956.600 sisa sebesar Rp. 1.149.800.

Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 34.792.500 dengan realisasinya Rp. 34.231.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 560.800 (Pencapaian input 98,39 %).

Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara: 7 Unit atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Alokasi dana sebesar Rp. 18.313.900 dengan realisasinya Rp. 18.313.900 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara: 1 Unit atau telah tercapai 100 %

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Alokasi dana sebesar Rp. 175.000.000 dengan realisasinya Rp. 174.411.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 589.000 (Pencapaian input 99,66 %)

Output : *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit*

d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 172.019.500 dan terealisasi sebesar Rp. 168.207.880 sisa sebesar Rp.3.811.620 atau tercapai sebesar 97,78%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 44.868.000 dan terealisasi sebesar Rp. 44.855.460 sisa sebesar Rp. 12.540,00.

Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 26.148.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.38.460,00 sisa sebesar Rp. 12.540 atau tercapai sebesar 99,95 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Alokasi dana sebesar Rp. 18.720.000 dengan realisasinya Rp. 18.720.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 2 Laporan atau telah tercapai 100 %

- B. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 42.246.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.036.920 sisa sebesar Rp. 2.209.080

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 42.246.000 dengan realisasinya Rp. 40.036.920 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.209.080 (Pencapaian input 94,77%).

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 84.905.500 dan terealisasi sebesar Rp. 83.315.500 sisa sebesar Rp. 1.590.000

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 2 Laporan.

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 84.905.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.315.500,00 sisa sebesar Rp. 1.590.000,00 atau tercapai sebesar 98,13 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 62.691.000 dan terealisasi sebesar Rp. 60.271.284 sisa sebesar Rp. 2.419.716 atau tercapai sebesar 96,14%

Outcome Program ini adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 62.691.000 dan terealisasi sebesar Rp. 60.271.284 sisa sebesar Rp. 2.419.716.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa : 1 Laporan.

a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.691.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.271.284,00 sisa sebesar Rp. 2.419.716,00 atau tercapai sebesar 96,14 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

f. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 79.491.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.465.920 sisa sebesar Rp. 25.080 atau tercapai sebesar 99,97

Outcome Program ini adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 sisa sebesar Rp. 0

Output : Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasinya Rp. 30.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %)

Output : *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 3 laporan.*

- B. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.491.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.465.920,00 sisa sebesar Rp. 25.080,00.

Output kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1 Laporan

- a. Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.491.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.465.920,00 sisa sebesar Rp. 25.080,00 atau tercapai sebesar 99,95 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

g. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3.660.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100,00%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi Alokasi dana sebesar Rp. 3.660.000 dengan realisasinya Rp. 3.660.000

Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00%)

Output sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: 1 Dokumen atau telah tercapai 100 %

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedawung

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Kedawung dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Kedawung dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Kedawung dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Kedawung berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Kedawung. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Kedawung. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Kedawung.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033, Kecamatan Kedawung yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Kedawung.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Dearah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Kedawung berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTR A Kecamatan Kedawung 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang

	Sarana dan Prasarana Aparatur		dan Prasaran Aparatur		ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan		- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	- Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum

	Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa		efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan
--	---	--	---	--	---

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Kedawung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat

Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Kedawung ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Kedawung ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diantaranya:

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 sebagaimana data terlampir (Lampiran II).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDAWUNG

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedawung dapat dilihat pada lampiran (Lampiran II).

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN KEDAWUNG

4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Kedawung Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Kedawung pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Kedawung dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut:



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

SKPD: 7-1.0-0.0-0.22. KECAMATAN KEDAWUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				1.722.840.332				6.812.020.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				1.722.840.332				6.812.020.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah		100 Prosen	1.722.840.332			100 Prosen	6.812.020.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	3.150.000	PIS		6 Jenis	98.000.000
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	1.000.000	PIS		3 Dokumen	17.000.000
0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	800.000	PIS		1 Dokumen	15.000.000
0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	500.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	15 Laporan	850.000	PIS		15 Laporan	6.000.000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- (Desa Tuk - Kecamatan kedawung)	1 Laporan	-			1 Laporan	30.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	1.576.463.000	PIS		3 Jenis	3.430.300.000
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	11 Orang/bulan	1.574.483.000	PIS		11 Orang/bulan	3.418.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1.000.000	PIS		1 Laporan	6.200.000
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	980.000	PIS		18 Laporan	6.100.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 orang	-	PIS		25 orang	60.000.000
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25 Paket	-			25 Paket	60.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 jenis	56.231.200	PIS		8 jenis	325.000.000
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	1.000.000	PIS		12 Paket	30.000.000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	32.662.000	PIS		12 Paket	130.000.000
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- (Desa Tuk - Kecamatan kedawung)	10 Paket	-			10 Paket	50.000.000
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	-			30 Paket	35.000.000
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	7 Paket	3.956.800	PIS		7 Paket	15.000.000
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	-			2 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	40 Paket	14.558.500	PIS		40 Paket	30.000.000
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	11 Laporan	2.475.000	PIS		11 Laporan	5.000.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	48 Laporan	1.578.900	PIS		48 Laporan	20.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil melaksanakan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan		4 Laporan	-	PIS		4 Laporan	1.250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- (- Kecamatan kedawung)	4 Unit	-			4 Unit	350.000.000
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	-			4 Unit	200.000.000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	-			5 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- (Desa Tuk - Kecamatankedawung)	5 Unit	-			5 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	-			1 Unit	500.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 jenis	33.804.432	PIS		2 jenis	75.000.000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	22.434.432	PIS		1 Laporan	60.000.000
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- (- Kecamatan kedawung)	10 Laporan	11.370.000	PIS		10 Laporan	15.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 jenis	53.191.700	PIS		5 jenis	1.573.720.000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	39.024.000	PIS		10 Unit	68.720.000
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	1 Unit	2.797.000	PIS		1 Unit	5.000.000
0.00.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		6 Unit	-			6 Unit	300.000.000
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	11.370.700	PIS		1 Unit	600.000.000
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	-			8 Unit	600.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				301.888.000				1.528.000.000
7.01.	KECAMATAN				301.888.000				1.528.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	163.066.000			100 Prosen	520.000.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan		4 Laporan	36.288.000	PIK, PIS		4 Laporan	130.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	10.140.000	PIK		2 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	26.148.000	PIS		12 Dokumen	80.000.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 kegiatan	25.248.000	PIS		3 kegiatan	180.000.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	-			3 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	25.248.000	PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 jenis	101.530.000	PIS		3 jenis	210.000.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	40.000.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2 Laporan	-			2 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	101.530.000	PIK, PIS		12 Laporan	120.000.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	58.131.000			100 Prosen	180.000.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 jenis	58.131.000	PIS		3 jenis	180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- (- Kecamatan kedawung)	3 Lembaga Kemasyarakatan	-			3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		2 Dokumen	-			2 Dokumen	50.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	58.131.000	PIK, PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	79.491.000			100 Prosen	130.000.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 laporan	30.000.000	PIS		12 laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	4 Laporan	30.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	49.491.000	PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	49.491.000	PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-			100 Prosen	418.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 BA	-	PIS		1 BA	418.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4 Orang	-			4 Orang	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 Orang	-			100 Orang	84.000.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	-			12 Dokumen	84.000.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	1.200.000			100 Prosen	280.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		18 jenis	1.200.000	PIS		18 jenis	280.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- (- Kecamatan kedawung)	24 Dokumen	-			24 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen	-			12 Dokumen	120.000.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- (- Kecamatan kedawung)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- (- Kecamatan kedawung)	2 Dokumen	-			2 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		8 Dokumen	1.200.000	PIS		8 Dokumen	50.000.000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- (- Kecamatan kedawung)	12 Laporan	-			12 Laporan	10.000.000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- (- Kecamatan kedawung)	4 Laporan	-			4 Laporan	10.000.000
J U M L A H					2.024.728.332				8.340.020.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kedawung di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kedawung sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Akhir (Renja Akhir) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kedawung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

Rancangan Renja SKPD Tahun 2024 (7-1.0-

WAHYU WIJAYA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR